



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	12 (<i>dua belas</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI dengan PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Phapros Tbk
Hari, Tanggal	:	Selasa, 21 April 2020
Pukul	:	11.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan Kondisi Aktual dan Kebijakan Subsidi terkait dengan Penanganan Covid-19
Hadir	:	1. 24 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir; 3. Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, Verdi Budidarmo; 4. Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Arief Pramuhanto, dan 5. Direktur Utama PT Phapros Tbk, Barokah Sri Utama beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI pada pukul 11.39 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 21 April 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara virtual.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menyadari sampai saat ini bangsa kita belum memiliki kedaulatan kesehatan, terlihat dari ketidaksiapan kita dalam menghadapi Pandemi covid-19, untuk itu Komisi VI DPR RI mendukung dan meminta BUMN Farmasi untuk menggunakan seluruh semangat, kekuatan, kemampuan, kepandaian serta niat baiknya untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan kesehatan bagi bangsa Indonesia. Dengan cara menyusun langkah konkret dalam memperkuat struktur industri obat dan alat kesehatan nasional agar tidak bergantung pada bahan baku obat dan alat kesehatan impor.
2. Komisi VI DPR RI mendorong BUMN Farmasi untuk berupaya secara maksimal dalam menyediakan Alat Pelindung Diri (APD), masker, *hand sanitizer*, alat rapid test, obat dan vitamin sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkannya dengan harga yang terjangkau dan mencegah kelangkaannya di tengah Pandemi Covid-19.
3. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Farmasi untuk menggunakan seluruh potensinya memastikan distribusi: rapid test, obat-obatan, vitamin, vaksin, *hand sanitizer* dan alat bantu tenaga medis lainnya bagi masyarakat di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih defisit dan tidak terjangkau.
4. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Farmasi memetakan kebutuhan bahan baku penyediaan obat dan suplemen, untuk menjamin kontinuitas produksi kebutuhan dalam negeri dan membuat *roadmap* kebutuhan pasokan (*supply chain*), kebutuhan relaksasi regulasi dan pendanaan.
5. Komisi VI DPR RI mendukung upaya riset dan kolaborasi BUMN Farmasi dalam rangka pengembangan vaksin atau obat dengan lembaga riset, perguruan tinggi atau pabrikan baik di dalam maupun diluar negeri. Pengembangan vaksin dan obat ini harus sesuai dengan karakteristik virus maupun kondisi di Indonesia. Untuk itu Komisi VI DPR RI menugaskan PT Bio Farma (Persero) sebagai *leader holding* BUMN Farmasi untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan. Komisi VI DPR RI akan mendorong Kementerian BUMN untuk melakukan sinergi dan koordinasi antara BUMN dan Kementerian lainnya.
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT. Kimia Farma Tbk sebagai produsen Cloroquin, Hydrocloroquin dan Kina yang telah digunakan baik di China, Amerika maupun Perancis sebagai rujukan pengobatan Covid-19 untuk melakukan uji klinis guna memenuhi pangsa pasar dalam negeri.
7. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Farmasi untuk memprioritaskan penggunaan komponen bahan baku dari dalam negeri dan melakukan eksplorasi/penelusuran terhadap berbagai biota yang tumbuh di seluruh wilayah Indonesia dalam memproduksi obat dalam rangka mewujudkan kemandirian obat nasional dan tidak tergantung pada bahan baku serta produksi obat dari luar negeri.
8. Komisi VI DPR RI meminta kepada BUMN Farmasi untuk terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia agar berperan aktif membantu pengendalian penyebaran Covid-19 secara mudah dan efektif, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan terus menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi vitamin C dan multivitamin.

9. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Farmasi untuk melakukan pemetaan pada bisnis obat-obatan dan alat kesehatan sehingga dapat dilakukan dalam proses tata kelola yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
10. Komisi VI DPR RI meminta PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Phapros Tbk, untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.20 WIB.

Jakarta, 21 April 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

ARIA BIMA
A-189